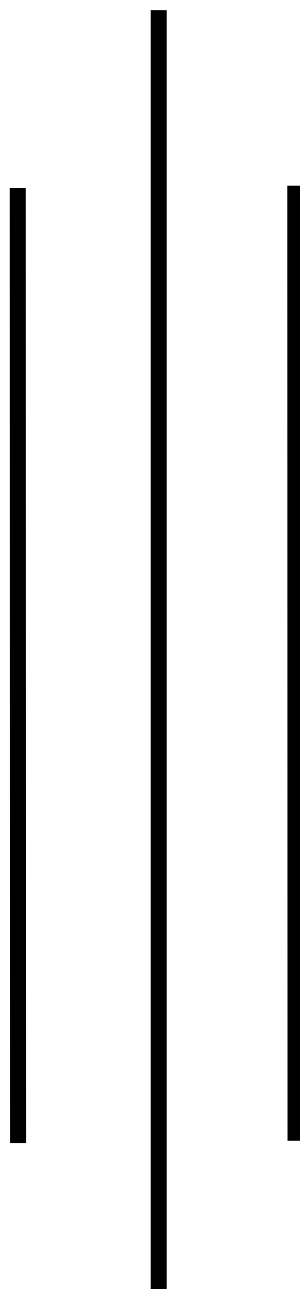


LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*). Tak hanya itu, informasi publik juga memainkan peranan yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan warga.

Indonesia telah menjamin hak Warga Negara dalam memperoleh informasi publik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib melaksanakan pelayanan informasi publik.

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif sesungguhnya telah tercetus jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diterapkan. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Yogyakarta memperkenalkan layanan bernama Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).

Melalui layanan berbasis SMS ini, publik dapat melayangkan keluhan atau meminta informasi seputar layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2023 diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 155 Tahun 2023 tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Keputusan ini menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Selain itu, ditetapkan pula 52 PPID Pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah. Ketugasan PPID Pelaksana ini melekat pada jabatan Sekretaris untuk OPD setingkat eselon II dan Pejabat Struktural yang membidangi Tata Usaha untuk OPD setingkat eselon III. Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari PPID Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugasannya ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 21/Kep/Kominfosan/IV/2023 Tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Ketugasan ini melekat pada petugas yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PLID bertugas membantu PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, telah disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 8.C/Kep/Kominfosan/I/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 21.A/Kep/Kominfosan/II/2022 Tentang Mekanisme Alur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) serta PPID Pelaksana, ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 22/KEP/KOMINFOSAN/V/2023 Tentang Daftar Informasi Publik Kota Yogyakarta dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 23/KEP/KOMINFOSAN/V/2023 Tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kota Yogyakarta.

Pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dilakukan secara terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama. Meskipun demikian, mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai oleh tiap-tiap PPID Pelaksana, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik menjadi tanggung jawab dari masing-masing PPID Pelaksana.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

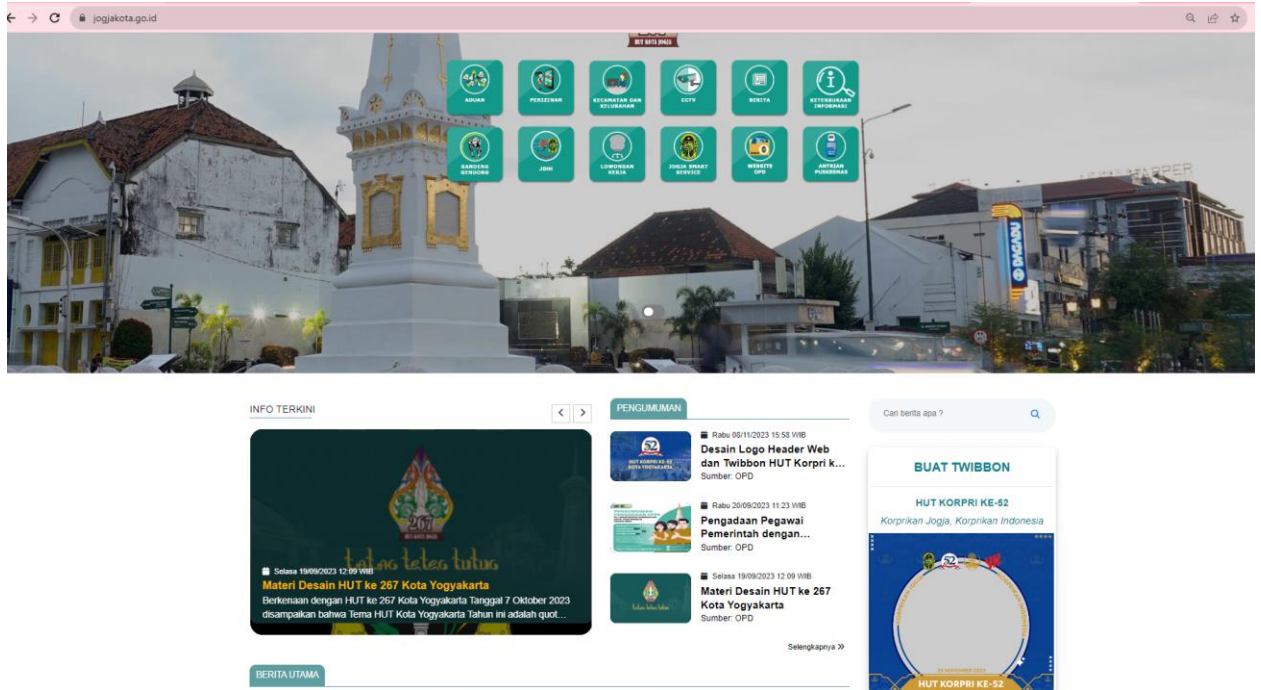
A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan dan

menyebarkan informasi melalui berbagai kanal seperti papan pengumuman, website maupun media sosial.

Untuk media website, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik pada portal *jogjakota.go.id*. Informasi tersebut juga dapat diakses pada subdomain *ppid.jogjakota.go.id*. Pada tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja hingga di tingkat Kelurahan telah memiliki dan mengelola Sub Domain/Website. Konten informasi publik di setiap subdomain ini diupayakan memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas informasi melalui website, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 12/KEP/KOMINFOSAN/II/2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Sehingga secara berkala admin website diberikan pelatihan tentang pengelolaan website agar menghasilkan konten yang berkualitas sesuai dengan kaidah Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1. Tangkapan Layar Portal *jogjakota.go.id*



Gambar 2. Tangkapan Layar Sub Domain *ppid.jogjakota.go.id*

Informasi publik terkait pelaksanaan program kota dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota juga dapat diakses melalui aplikasi android Jogja Smart Service dan media sosial Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saat ini terdapat 5 (lima) platforms media sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Twitter (PemkotJogja), Instagram

(@pemkotjogja), Facebook (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta), Tiktok (PemkotJogja), serta Kanal Youtube YKTV.

Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik di kantor Balaikota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho. Pada tahun 2023, Pelayanan informasi tatap muka dilaksanakan melalui berbagai kegiatan di wilayah.

Selain memberikan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik. Untuk menunjang pelayanan permohonan ini, telah disediakan sebuah ruangan yang difungsikan secara khusus untuk melayani masyarakat yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi public.





Gambar 3. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik.

Ruang Pelayanan Informasi ini berada di Mal Pelayanan Publik Kompleks Balaikota Yogyakarta serta Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Ruangan ini dilengkapi dengan satu unit komputer, satu pesawat telepon, dan tempat duduk untuk petugas dan penerima layanan. Publik juga dapat melakukan permohonan informasi secara online dan penyampaian keberatan melalui *ppid.jogjakota.go.id* dan e-mail *ppid@jogjakota.go.id*. Layanan online melalui website ini telah tersedia sejak tahun 2019.

Masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan terkait Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat mengakses layanan UPIK melalui SMS 08122780001 dan aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis android. Selain itu masyarakat juga dapat aplikasi SP4N Laporan! yang merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Permohonan informasi publik yang disampaikan melalui kanal pengaduan dan informasi ini akan diproses sesuai dengan tata cara dan prosedur pelayanan informasi melalui PPID.

Secara umum, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja (Senin – Kamis 07.30 – 15.30 dan Jumat

07.30 – 14.30 dengan waktu istirahat 12.30 – 13.00). Sementara untuk layanan UPIK dan JSS dapat dimanfaatkan setiap hari.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Secara khusus, ketugasan tersebut diampu oleh Kelompok Substansi Layanan Informasi Dan Pengaduan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan ketugasan tersebut, dibutuhkan tenaga Arsiparis, Pustakawan, Pranata Hubungan Masyarakat, dan Pranata Komputer. Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat empat orang pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi. Dua diantara pegawai tersebut telah mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangan kapasitas dengan menyelenggarakan rapat dan diseminasi informasi. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan diseminasi informasi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Sehingga dengan adanya diseminasi dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dan update informasi dengan PPID Pelaksana guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pelaksana. PPID Kota Yogyakarta juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID tingkat DIY yang beranggotakan PPID utama Kabupaten/Kota/Pemda DIY serta Komisi Informasi Daerah DIY serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

C. ANGGARAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPID seperti rapat koordinasi, workshop, diseminasi, dan FGD PPID serta pengelolaan informasi public di tingkat Kota Yogyakarta dibebankan dalam anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Sementara untuk pengelolaan informasi publik di OPD, pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing OPD. Pada Tahun 2023, anggaran murni untuk Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Rp. 275.996.000,-. Anggaran ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023, terdapat 167 permohonan informasi melalui PPID yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang tajam dari tahun sebelumnya. Sebagai

informasi, pada tahun 2021 terdapat 40 permohonan informasi publik, kemudian pada tahun 2022 terdapat 96 permohonan informasi public.

Peningkatan permohonan informasi public ini dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi tentang pelayanan informasi public melalui media sosial yang dimiliki, sehingga masyarakat semakin memahami akan kehadiran PPID dan tidak ragu untuk mengajukan permohonan informasi.

Dari jumlah 167 permohonan informasi, terdapat permohonan informasi yang masuk melalui email sebanyak 8 permohonan, 1 permohonan langsung melalui meja pelayanan PPID di Mal Pelayanan Publik dan permohonan lainnya disampaikan melalui website. Sebagian besar informasi publik yang diminta digunakan untuk kepentingan akademis sedangkan tujuan penggunaan yang lain adalah untuk kelengkapan pengajuan izin serta bahan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Dari jumlah total tersebut, 137 permohonan dikabulkan, dengan rincian 134 diberikan seluruhnya dan 3 permohonan informasi yang diberikan sebagian. Selain itu terdapat 29 permohonan informasi yang ditolak dengan rincian karena alasan 1 informasi yang dikecualikan, 22 permohonan karena informasi tidak dikuasai dan 6 lainnya karena tidak bersungguh-sungguh serta tidak dapat melengkapi syarat permohonan informasi. Rincian Pelayanan Informasi Publik terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta nihil sengketa informasi public.

V. CAPAIAN PPID

Selama tahun 2023, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta telah meraih beberapa pencapaian berikut :

1. Memperoleh predikat informatif dengan nilai 100 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Daerah DIY tahun 2023;
2. Memperoleh penghargaan sebagai PPID Utama dengan jumlah Badan Publik yang informatif terbanyak yaitu 39 Badan Publik.

VI. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik baik pada PPID Utama maupun PPID Pelaksana perlu ditingkatkan.
- b. PPID Pelaksana memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik namun belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi.
- c. *Transfer of knowledge* terkait pelayanan informasi publik antar pegawai masih rendah.
- d. Penyusunan DIK terendala benturan aturan di masing-masing sektor.

VII. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Peningkatan kompetensi bagi petugas pelaksana layanan informasi publik melalui pelatihan dengan Komisi Informasi Daerah DIY maupun Pelatihan/Bimtek/Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi RI.

- b. Pendampingan lebih intensif bagi Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Melakukan pembaharuan terhadap Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian

Selaku PPID Utama



Ignatius Pinastono, S.Sos.,MM. /

Permohonan Informasi PPID Utama Kota Yogyakarta

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	9	1	9	8	1	0	0	0	0
2	Februari	18	1	18	18	0	0	0	0	0
3	Maret	6	2	6	5	1	0	0	0	0
4	April	3	4	2	2	0	1	0	2	0
5	Mei	11	1	7	7	0	4	0	2	2
6	Juni	25	1	21	21	0	4	0	4	0
7	Juli	11	1	6	5	1	5	1	3	1
8	Agustus	14	1	13	13	0	1	0	1	0
9	September	12	1	9	9	0	3	0	3	0
10	Oktober	25	2	22	22	0	2	0	1	1
11	November	19	1	10	10	0	9	0	7	2
12	Desember	14	4	14	14	0	0	0	0	0
	Total	167	2	137	134	3	30	1	23	6

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi PPID Utama Kota Yogyakarta Melalui Website

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	6	1	8	7	1	0	0	0	0
2	Februari	16	1	16	16	0	0	0	0	0
3	Maret	5	2	5	4	1	0	0	0	0
4	April	3	4	2	2	0	1	0	1	0
5	Mei	10	1	6	6	0	4	0	2	2
6	Juni	24	1	19	19	0	4	0	4	0
7	Juli	10	1	5	5	1	5	1	3	1
8	Agustus	14	1	13	13	0	1	0	1	0
9	September	12	1	9	9	0	3	0	3	0
10	Oktober	25	2	22	20	1	2	0	1	1
11	November	19	1	10	10	0	9	0	7	2
12	Desember	14	4	14	14	0	0	0	0	0
	Total	158	2	129	125	4	29	1	22	6

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi PPID Utama Kota Yogyakarta Melalui Email

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	2	2	2	1	1	0	0	0	0
2	Februari	2	2	2	2	0	0	0	0	0
3	Maret	1	0	1	1	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	0	0	0	0	1	0	0	1
6	Juni	1	9	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	1	0	1	1	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	8	1	7	6	1	1	0	0	1

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi PPID Utama Kota Yogyakarta Secara Langsung

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	2	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	2	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	3	3	3	3	0	0	0	0	0
2	Februari	2	2	2	2	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	0	0	0	0	2	0	1	1
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	1	1	0	0	0	0	0
11	November	2	1	2	2	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	10	2	8	8	0	2	0	1	1

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	2	2	2	2	0	0	0	0	0
2	Februari	1	2	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	8	1	8	8	0	0	0	0	0
7	Juli	2	0	1	1	0	1	1	0	0
8	Agustus	3	1	3	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	2	2	0	0	0	0	0
11	November	3	0	2	2	0	1	0	1	0
12	Desember	4	4	4	4	0	0	0	0	0
	Total	26	1	24	21	0	2	1	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Kebudayaan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	2	2	2	2	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	3	1	1	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4	2	4	4	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Inspektorat

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	1	2	1	1	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	2	2	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3	2	3	3	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	3	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	3	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas PUPKP

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	3	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	2	6	2	2	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	2	1	1	1	0	1	0	1	0
10	Oktober	2	2	2	2	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	6	2	2	0	0	0	0	0
	Total	9	3	8	8	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi BPKAD

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	7	2	7	7	0	0	0	0	0
3	Maret	3	2	3	3	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	0	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	2	6	2	2	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	3	3	3	3	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	0	0	0	1	0	1	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	17	3	16	16	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Kominfo

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	1	4	4	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	0	1	1	0	1	0	0	1
6	Juni	1	0	1	1	1	0	0	0	0
7	Juli	1	0	1	1	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	November	1	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	3	9	3	3	0	0	0	0	0
	Total	15	1	14	13	1	1	0	0	1

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	5	1	1	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	2	2	0	2	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	5	1	1	0	0	0	0	0
	Total	4	1	4	2	2	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	1	0	1	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	1	1	0	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	5	1	1	0	1	0	1	0
5	Mei	1	1	0	0	0	1	0	0	1
6	Juni	3	9	2	2	0	1	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	7	5	4	4	0	3	0	2	1

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	1	0	0	0	0	1	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3	1	2	1	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	1	2	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat

Permohonan Informasi Dinas Perhubungan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	6	1	0	0	0	0	0	0
6	Juni	2	2	2	2	0	0	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	3	3	2	0	0	1	0	1	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	7	4	6	3	0	1	0	2	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	4	2	4	3	0	1	0	1	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4	2	4	3	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Perdagangan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	1	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Perustakaan dan Kearsipan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	1	1	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	1	2	2	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Kesehatan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	6	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	5	3	5	5	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	7	3	7	7	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Pertanian Pangan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	0	0	0	1	0	1	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	3	1	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2	3	1	0	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	2	1	2	2	0	0	0	1	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3	1	3	3	0	0	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	5	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	1	3	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	2	1	1	0	0	0	0	0
	Total	4	3	4	4	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Dinas Lingkungan Hidup

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	5	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	1	3	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	3	1	3	3	0	0	0	0	0
11	November	1	4	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	7	3	7	7	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	5	1	1	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	September	1	3	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	3	1	3	3	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	0	0	1	0	1	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	7	3	6	6	0	1	0	1	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Kemantren Mergangsan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	1	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	1	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Kemantren Gondokusuman

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	1	1	1	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1	1	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi Kemantren Umbulharjo

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Total	1	1	1	1	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi bagian Organisasi

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Total	2	2	2	2	0	0	0	0	0

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan